

VISI DAN MISI

**TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN
SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG
ADIL DAN MELAYANI**



**BANDA ACEH
SEPTEMBER 2016**

VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH PERIODE 2017 - 2022

Oleh :

Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah

(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh)

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia sejak era pra-kemerdekaan sampai sekarang. Kontribusi Aceh di berbagai bidang di level nasional telah diakui oleh semua elemen bangsa. Namun sayangnya berbagai gejala sosial dan politik serta bencana yang terjadi dalam empat dasawarsa terakhir telah menyebabkan Aceh tertinggal dalam berbagai bidang dengan provinsi lain, walaupun dalam hal-hal tertentu beberapa inovasi dan gagasan-gagasan penting tetap lahir dan muncul di Aceh.

Pasca konflik dan tsunami di Aceh, khususnya dalam kurun waktu 2007-2012 Aceh berhasil menarik perhatian nasional terutama dalam hal program-program pro rakyat yang dilahirkan. Program-program prorakyat di Aceh 2007-2012 yang menjadi rujukan nasional antara lain dalam bidang kesehatan, sistem evaluasi dan monitoring pembangunan serta reformasi birokrasi.

Terkait isu kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Aceh atau yang lebih dikenal dengan nama JKA telah diadopsi dalam skala nasional oleh pemerintah pusat melalui program kesehatan gratis yang dikelola oleh BPJS. Program monitoring dan evaluasi pembangunan atau yang lebih dikenal dengan Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) Otsus APBA juga diadopsi secara nasional pada masa pemerintahan SBY dalam bentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Kedua program unggulan ini menarik perhatian pusat karena mampu diterapkan oleh sebuah provinsi yang baru keluar dari konflik. Selain itu, pada era tersebut Aceh juga satu-satunya provinsi yang menerapkan sistem Fit and Proper Test bagi calon kepala satuan kerja pemerintah daerah yang di Aceh dikenal dengan SKPA. Dari proses yang transparan dan akuntabel ini mampu melahirkan pimpinan SKPA yang memiliki kompetensi yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Pemerintah Aceh berhasil mewujudkan target-target pembangunan yang signifikan berdampak terhadap keberhasilan pembangunan di Aceh berkat komitmen terhadap reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah penurunan angka kemiskinan dari 28% menjadi 17,8%. Indikator lainnya adalah capaian realisasi anggaran APBA rata-rata di atas 95% setiaptahun. Selain itu pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 8.21% (di atas rata-rata nasional).

Sayangnya pasca periode tersebut, Aceh kembali mengalami stagnasi dan kemunduran akibat dari lemahnya perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini berdampak secara luas terhadap rendahnya produktivitas masyarakat, angka kemiskinan tidak menurun dari kisaran 18%, kualitas pendidikan semakin menurun, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin sulit, dan yang tidak kalah pentingnya adalah stagnannya kemampuan fiskal daerah yang berpotensi menjadi acaman bagi keberlanjutan pembanguan Aceh paska dana otsus.

Tingkat kemanfaatan pembangunan Aceh dalam lima tahun terakhir sangat rendah meskipun didukung oleh alokasi dana otsus yang rata-rata berkisar 7,2 trilyun rupiah per tahun akibat dari pembangunan tanpa menganut prinsip-prinsip *evidence based planning*. Hal ini menjadi sinyal berbahaya mengingat alokasi dana otsus akan berakhir pada tahun 2027. Kasus yang paling kronis terjadi di beberapa SKPA penting dan strategis seperti Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Kesehatan. Padahal satuan-satuan kerja tersebut menyerap anggaran paling besar dibandingkan satuan kerja lainnya. Pola ini telah menjadi trend dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi pimpinan Aceh ke depan untuk mengampulasi trend negatif ini agar Aceh tidak kehilangan momentum emas dalam membangun dirinya untuk menjadi daerah maju dan sejahtera.

Tiga Masalah Pokok Aceh

Dalam mewujudkan cita-cita dan amanat rakyat Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006), Aceh menghadapi tiga tantangan pokok yakni: (1) Hilangnya jati diri *ureuëng Acèh* yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial, dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban; (2) Melemahnya sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri; dan (3) Hilangnya karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa akibat lemahnya sistem kepemimpinan yang seharusnya berperan dalam memberikan suri tauladan bagi segenap lapisan aparatur.

Hilangnya jatidiri *UreuëngAcèh* yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial, dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban

Konflik dan sistem politik yang berlangsung selama ini telah melahirkan nilai-nilai pragmatisme dalam diri masyarakat yang dari waktu ke waktu tumbuh semakin besar. Permasalahan ini diperparah dengan mekanisme bantuan masa rehabilitasi dan rekonstruksi (pasca tsunami 2004) yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial dan gotong royong yang menjadi jatidiri rakyat Aceh selama ratusan tahun. Di sisi lain perkembangan sistem pendidikan yang ada tidak mampu memperbaiki kerusakan nilai-kepekaan sosial dan gotong royong dalam masyarakat. Sistem pendidikan kita justru membuat generasi muda semakin larut dalam hiruk pikuk pragmatisme dan oportunitas yang dipertontonkan oleh orang tua dan lingkungannya. Tidak mengherankan jika selama ini Aceh telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang lemah dan tidak memiliki integritas serta berkomitmen untuk pembangunan. Intoleransi terhadap perbedaan juga semakin memprihatinkan, baik dalam aspek agama maupun dalam berbagai strata sosial lainnya sehingga berpotensi melahirkan generasi yang rentan terhadap konflik horisontal secara berkepanjangan.

Sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri semakin melemah

Kesenjangan sosial dan kemiskinan pasca konflik dan tsunami belum mampu dituntaskan dengan baik, padahal pada periode 2007-2012 angka kemiskinan berhasil ditekan secara signifikan. Namun di era berikutnya, kesenjangan terhadap akses dan kesempatan dalam berbagai sektor perekonomian telah meluluhlantakkan kekuatan ekonomi masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana dasar ekonomi masyarakat seperti pertanian dan perkebunan tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh sehingga masyarakat berada dalam situasi terjepit. Tidak berlebihan bila periode ini rakyat Aceh disebut berada dalam *MasaPaceklik di era post-modernist*. Sebagai dampaknya perilaku penyimpangan anggaran publik oleh aparatur pemerintah menjadi sebuah tontonan dan suatu keniscayaan. Di sisi lain masyarakat yang tidak memiliki peluang dan akses terhadap anggaran semakin terpuruk dan termarginalkan.

Hilangnya karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Perilaku aparat pemerintah dan birokrasi yang tidak terkontrol telah membuat wibawa pemerintah semakin lemah. Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) yang seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan riil (berdasarkan data yang valid) telah digunakan dengan sewenang-wenang tanpa melalui sebuah perencanaan yang baik dan terukur. Perhatian pemerintah Aceh terhadap pelayanan publik secara maksimal menjadi terabaikan. Fungsi dan peran aparat teknis yang seharusnya menjadi pendukung produktivitas masyarakat malah mengalokasikan pikiran dan waktunya untuk mempertahankan eksistensi dalam jajaran struktural pemerintahan.

BERKOMITMEN UNTUK BEKERJA BAGI ACEH YANG SEJAHTERA

Pasangan Irwandi-Nova memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa rakyat Aceh masih memiliki landasan spiritual yang dapat dijadikan modal untuk meluruskan kembali arah pembangunan Aceh. Ini dapat menjadi modal dalam hal reorientasi sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kami berkeyakinan untuk dapat melahirkan sebuah ideologi yang menjadi pemersatu dan landasan perjuangan bagi Aceh yang bermartabat.

Sebagai indikasi dari semua permasalahan di atas, berikut kami sajikan data dan fakta problematika sosial dan pembangunan di Aceh:

- a. Angka kemiskinan di Aceh sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu 17,11% dan berada di atas rata-rata nasional (11,22%), padahal pada masa periode 2007-2012 berhasil menurunkan dari 28% menjadi 18%, artinya selama periode ini hanya mampu menurunkan sekitar 1%. Aceh juga tertinggal jauh dibandingkan Sumatera Utara (10,79%) dan Sumatera Barat (6,71%), padahal jumlah anggaran pembangunan Aceh lebih besar dibandingkan dua provinsi ini;
- b. Kualitas pelayanan kebutuhan dasar Rakyat Aceh seperti listrik, pendidikan, dan kesehatan semakin mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari: (1) ketersediaan daya listrik saat ini hanya 350 MW, sementara kebutuhan saat beban puncak sebesar 365 MW, belum lagi bila terjadi pemutusan suplay daya dari Sumatera Utara yang diakibatkan oleh gangguan terhadap jaringan interkoneksi; (2) kualitas layanan pendidikan di Aceh sangat memprihatinkan artinya program-program yang dijalankan selama ini tidak tepat sasaran dimana 56,63% Rakyat Aceh saat ini hanya lulus SMP dan SD; (3) akses terhadap layanan kesehatan semakin sulit terlihat dari tingginya angka kematian ibu dan anak mencapai 192 per 100.000 kelahiran.
- c. Tingkat produktivitas pertanian Aceh khususnya produksi gabah masih rendah padahal persentase tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 44,09% dari 1.931.823 tenaga kerja di Aceh. Rendahnya produksi gabah Aceh disebabkan oleh luasnya lahan yang masih belum teraliri irigasi (47% dari 324.118 Ha lahan sawah) sehingga masih berstatus tadah hujan.

VISI

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut: (1) **Aceh yang damai** bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; (2) **Aceh yang sejahtera** bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak; (3) **Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani** bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

MISI

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- 1) Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafii'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
- 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
- 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
- 5) Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
- 6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
- 7) Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
- 8) Membangundan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
- 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN

Dalam periode 2017-2022, pemerintahan Irwandi-Nova akan menjalankan 15 program unggulan sebagai berikut:

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)

JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi:

- a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;
- b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;
- c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri (Loan);
- d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh

2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

3. Aceh Caròng

Anak Aceh cerdas (caròng) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas. Program-program yang akan dijalankan untuk tujuan tersebut antara lain:

- a. Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal;
- b. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah;
- c. Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Aceh khususnya daerah terpencil;
- d. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh;
- e. Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
- f. Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat internasional dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh.

4. Aceh Energi

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan. Agenda-agenda strategis yang akan dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan *Master Plan* Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi (validasi data primer dan rencana pengembangan);
- b. Penerapan *Public Private Partnership* untuk utilisasi sumber daya energi skala menengah dan besar khususnya panas bumi dan tenaga air tanpa menggunakan hutang luar negeri;
- c. Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh;

- d. Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan pembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitas menengah;
- e. Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan.
- f. Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.

5. Aceh Meugoë dan Meulaôt

Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi

- a. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;
- b. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;
- c. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
- d. Kemandirian rantai pasok (*supply chain*) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
- e. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan

6. Acèh Troë

Pemenuhan bahan pangan dan gizibagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri melalui:

- a. Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan;
- b. Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat;
- c. Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga;
- d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

7. AcèhKreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal;
- b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;
- c. Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa;

8. AcèhKaya

Merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda;
- b. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi entrepreneur;
- c. Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda.

9. AcèhPeumulia

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan;

- a. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-

- kinerja
- b. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan
 - c. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan

10. Acèh Damê

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;

- a. Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai;
- b. Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- c. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh;
- d. Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah

11. AcèhMeuadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;

- a. Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatan pendidikan;
- b. Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial;
- c. Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman;
- d. Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat di setiap tingkatan

12. Acèh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;

- a. Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh
- b. Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang mendukung peningkatan prestasi olahragawan;
- d. Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaring bibit-bibit unggul.

13. Acèh Green

Menegaskan kembali pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;

- a. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
- b. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- c. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat
- d. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
- e. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan

14. AcèhSeuninya

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda. Pendekatan program ini dilakukan melalui:

- a. Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secara bertahap;

- b. Penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu;

15. Acèh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi;

PENUTUP

Visi dan Misi serta program unggulan ini dilandasi semangat kesetaraan terhadap perempuan dan berbagai strata sosial lainnya. Dengan harapan bila kami diberi kepercayaan oleh Rakyat Aceh untuk menjadi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 semua gagasan ini dapat diwujudkan untuk perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh.

PASANGAN CALON

drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc
Calon Gubernur

Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T
Calon Wakil Gubernur



**IRWANDI YUSUF
NOVA IRIANSYAH
2017**

#salamJKA #pilkadahalal #PilkadaAceh2017